

Judul : Pemerintah waspadai ketidakpastian global
Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Pemerintah Waspadai Ketidakpastian Global

Kementerian Keuangan tengah merumuskan inovasi terkait dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang mampu menstimulus kenaikan pendapatan negara.

TESA OKTIANA SURBAKTI
tesa@mediaindonesia.com

INDONESIA dan negara-negara berkembang lainnya dinilai harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ketidakpastian ekonomi global mengingat negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa belum menunjukkan kesepakatan tentang transaksi perdagangan mereka. "Dalam pertemuan G-20, kita melihat suasana ketidakpastian masih akan terus berlangsung karena tidak ada kesepakatan bagaimana mereka mengurangi

perselisihan dari sisi perdagangan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat kerja soal APBN dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, kemarin.

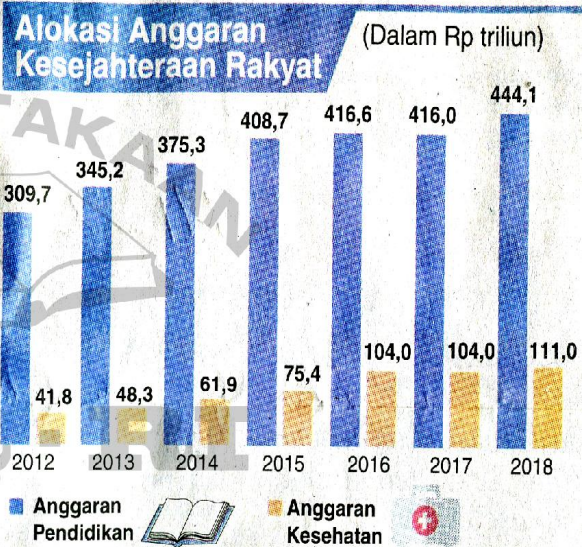
Berlanjutnya ketidakpastian global itu mesti diantisipasi dengan strategi khusus terkait dengan stabilitas. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian/lembaga yang berkorelasi terhadap penguatan neraca pembayaran.

Instrumen fiskal dikatakannya menjadi salah satu senjata untuk mendorong kinerja ekspor. Kementerian Keuangan, sambung dia, tengah merumuskan inovasi mengenai kebijakan fiskal yang mampu menstimulus kenaikan pendapatan negara, baik melalui aspek devisa negara maupun ekspor barang dan jasa.

Pihaknya juga mengevaluasi kembali usul dari kementerian/lembaga yang garis besarnya bertujuan mendorong capaian ekonomi nasional.

Fokus program kesra

Peningkatan kualitas program



kesejahteraan rakyat dipastikan juga akan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam RAPBN 2019. Menkeu mengatakan program tersebut sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan yang saat ini sudah mencapai *single digit*.

"Program untuk kesejahteraan rakyat, dengan adanya tren pe-

nurunan kemiskinan, kita ingin terus menurun karena itu salah satu prioritas untuk 2019," ungkap Menkeu.

Program kesejahteraan rakyat lainnya yang ikut menjadi prioritas dalam RAPBN 2019 antara lain penambahan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.



“Itu yang akan dievaluasi untuk ditingkatkan. Dari jumlah maupun efektivitas dari target, eksekusinya termasuk dana desa,” ujarnya.

Selain itu, fokus lainnya dalam RAPBN 2019 ialah peningkatan pagu belanja infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan produktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. “Infrastruktur untuk bisa diselesaikan, terutama yang dianggap strategis, untuk bisa meningkatkan konektivitas dan produktivitas ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, pemerintah dan Komisi XI DPR kemarin telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat rapat paripurna.

Pokok-pokok perubahan RUU PNBP meliputi penyempurnaan definisi dan ruang lingkup PNBP, sekaligus memperjelas perbedaan definisi dengan pajak dan pungutan/retribusi daerah.

Selain itu, terdapat ketentuan objek PNBP yang terdiri atas enam klaster. Pengaturan tarif PNBP juga turut mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta aspek keadilan.

“Pokok-pokok perubahan tersebut menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pengolahan PNBP yang optimal dan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Sri Mulyani. (Ant/X-11)